

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya tersebut masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk mendukung upaya tersebut biaya yang besar dibutuhkan oleh pemerintah. Menurut Christina dan Kepramareni (2012) dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah. Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2004). Dengan pajak pemerintah dapat mendanai dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan, negara membutuhkan dana yang besar (Winerungan, 2013). Pemerintah bertekad untuk melepaskan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi

daerah (Christina dan Kepramareni, 2012). Melalui pajak daerah pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sebab dengan penerimaan yang maksimal pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang bisa digali yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini dan Tarmudji, 2012). Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi. Selain jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tercatat Di Kantor Samsat**  
**Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2015**

No	Jenis Kendaraan	Tahun	
		2014 (unit)	2015 (unit)
1	Sedan dan sejenisnya	1.204	1.222
2	Jeep dan sejenisnya	798	831
3	Station dan sejenisnya	8.598	9.532
4	Sepeda motor	188.582	197.141
<b>Jumlah (unit)</b>		<b>199.182</b>	<b>208.726</b>

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, data diolah 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan. Menurut Putra dan Jati (2017) jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi,

kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor. Saat ini *daeler-daeler* menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan dan syarat pembelian yang mudah. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Sehingga diharapkan pemerintah mampu meningkatkan penerimaan daerahnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Semakin meningkatnya wajib pajak harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dinamis Provinsi Jawa Timur triwulan I-2017 ([http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis\\_1\\_2017.pdf](http://www.bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/publikasi/dinamis_1_2017.pdf)). Pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang paling tinggi pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada tahun 2014 sebesar 37,41% dan tahun 2015 sebesar 39,30%. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesadaran yang baik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi juga ikut andil menyumbang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Hal

tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan antara lain pengetahuan tentang pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah dkk, 2016). Kualitas pengetahuan yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga menyangkut tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Aziza dalam Arahman, 2012). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012). Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak yang baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan negara.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib

pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2006). Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Oleh karena itu sanksi perpajakan relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik, mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta

memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Apabila petugas Samsat Kabupaten Ngawi bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya. Sesuai pendapat Rajif (2012) peningkatan kualitas dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan akan meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Jika masyarakat atau wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, begitu pula beban pajak yang mereka tanggung akan terpenuhi. Namun jika penghasilan mereka menurun sedangkan kebutuhan hidup naik maka kewajibannya membayar pajak akan tertunda. Sesuai pendapat Sari dan Susanti (2013) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi seberapa besar penghasilan yang didapatkannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Karena besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak.

Dari banyak penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan tentang variabel-variabel yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kota Singaraja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) menyatakan bahwa variabel pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPPP Kabupaten Seluma. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, variabel kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan. Oleh karena itu penelitian ini menguji kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda yaitu menguji pengaruh pengetahuan

pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian dan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hampir sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Namun dalam penelitian ini melibatkan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?



3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
6. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi peneliti sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah jumlah literatur yang nantinya dapat dijadikan referensi untuk pengembangan teori yang berkaitan dengan kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya dalam hal kepatuhan membayar pajak PKB dan menambah, melengkapi sekaligus untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat digunakan untuk menambah referensi baik dalam teori ataupun kesimpulan akhir atas penelitian yang dilakukan.

